

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pdt.G/2025/PA.AGM)**



TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) Ilmu Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

GABRELLA JULI ANDANI

NIM. 2423680022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pdt.G/2025/PA.AGM)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)
Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

GABRELLA JULI ANDANI

NIM. 2423680022

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
#Ewrite: www.uinsufsbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) DI PENGADILAN AGAMA ARGA
MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pdt.G/2025/PA.AGM)”**

Pegulis

GABRELLA JULI ANDANI
NIM. 2423680022

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2026.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Fatimah Yunus, M.Ag (Ketua Penguji)	21 Mei 2026	1.
2	Dr. Iwan Romadhan S, M.H.I (Sekretaris)	20 Mei 2026	2.
3	Prof. Dr. Suryani, M.Ag (Penguji I)	19 Mei 2026	3.
4	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji II)	18 Mei 2026	4.

Mengetahui
Rektor UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu,

Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag
NIP. 19671114 199303 1 002

Bengkulu, 11 Mei 2026
Direktur Pogram Pascasarjana UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu,

Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag, M.Pd
NIP. 19690308 199603 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, April 2026
Saya yang menyatakan



Gabrella Juli Andani
NIM. 2423680022

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ali Akbar Jono, S. Ag, M.Pd**
NIP : 197509252001121004
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Anggi Sapta Wijaya**
NIM : **2423680010**
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLIKASI PODCAST YOUTUBE SEBAGAI MEDIA MEMBUKA KASUS KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS PODCAST DENNY SUMARGO)**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Ali Akbar Jono, S. Ag, M.Pd
NIP. 197509252001121004

Bengkulu, 8 Mei 2026

Petugas Verifikasi,


Dr. Nenah Julir, Lc, M. Ag
NIP. 197509252006042002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gabrella Juli Andani

NIM : 2423680022

Tempat/Tanggal lahir : Palembang / 12 Juli 1995

Institusi : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Fakultas/Prodi : Pascasarjana S2 / Hukum Keluarga Islam

Alamat : Jl. Prof M Yamin SH No.68, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota

Arga Makmur, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu

Nomor Telp/Hp/email: 082281848596 / gabrellajuliandani@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul:
"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
526/Pdt.G/2025/PA.AGM)"

bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari makalah dan karya ilmiah dari hasil-hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bengkulu

Pada tanggal : Juni 2026

Mengetahui
Kaprodik

Dr. Nenah Julir, Lc., M.A
NIP. 197509252006042002

Yang membuat pernyataan



Gabrella Juli Andani
NIM. 2423680022

MOTTO

Dua kali Allah ulangi...

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

fa inna ma‘al-‘usri yusrâ

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

inna ma‘al-‘usri yusrâ

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa
Karya yang sederhana ini untuk:

Ibu dan Alm. Ayahku tercinta
Adik-adikku tersayang,
Dan seluruh pihak yang telah kebersamaiku dalam berproses
Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang
Yang tulus dan tiada ternilai besarnya
Terima kasih.



ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pdt.G/2025/PA.AGM)

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang secara hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya menyangkut hubungan keluarga, tetapi juga memiliki implikasi administratif bagi aparatur negara, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, belum mengatur mengenai perceraian PPPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan perkara perceraian PPPK serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM di Pengadilan Agama Arga Makmur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-kualitatif. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim dan panitera, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara perceraian PPPK di Pengadilan Agama Arga Makmur dilakukan melalui sistem e-Court dengan memenuhi persyaratan administratif, termasuk adanya surat izin perceraian dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meskipun peraturan yang dipakai adalah untuk Pegawai Negeri Sipil. Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tetap menerapkan tahapan hukum acara perdata secara lengkap, mulai dari upaya perdamaian, pembuktian, hingga penjatuhan putusan. Dengan demikian, putusan talak satu bain sughra dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perceraian PPPK di Pengadilan Agama Arga Makmur tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan tertib administrasi kepegawaian.

Kata kunci: *Perceraian, PPPK, Pengadilan Agama, Ratio Decidendi, Hukum Keluarga Islam.*

ABSTRACT

Juridical Analysis of Divorce of Government Employees with Work Agreements (PPPK) at the Arga Makmur Religious Court

(Study of Decision Number 526/Pdt.G/2025/PA.AGM)

Divorce is one form of marital dissolution which, legally, can only be carried out through a court decision. In practice, divorce does not only concern family relationships but also has administrative implications for state officials, including Government Employees with Work Agreements (PPPK). Government Regulation Number 45 of 1990 concerning amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 on marriage and divorce permits for Civil Servants has not yet regulated divorce for PPPK. This research aims to analyze the examination process of PPPK divorce cases and the legal considerations (*ratio decidendi*) of the panel of judges in Decision Number 526/Pdt.G/2025/PA.AGM at the Arga Makmur Religious Court. This study employs a normative-empirical legal method with a juridical-qualitative approach. Primary data were obtained from court decisions and interviews with judges and court clerks, while secondary data were derived from statutory regulations and relevant legal literature. The results of the study indicate that the settlement process of PPPK divorce cases at the Arga Makmur Religious Court is conducted through the e-Court system by fulfilling administrative requirements, including the existence of a divorce permit letter from the Civil Service Supervisory Officer (PPK), even though the regulation used applies to Civil Servants. During the examination of the case, the panel of judges continued to apply the stages of civil procedural law comprehensively, starting from reconciliation efforts, evidentiary proceedings, to the issuance of the decision. Therefore, the decision granting one *talak bain sughra* in the case demonstrates that the settlement of PPPK divorce cases at the Arga Makmur Religious Court remains grounded in the principles of legal certainty, justice, and orderly civil service administration.

Keywords: *Divorce, Government Employees with Work Agreements (PPPK), Religious Court, Ratio Decidendi, Islamic Family Law.*

Valid document
Validated & Verified By :

Ka. UPT BAHASA
UTN FAS BENGKULU

ملخص

تحليل قانوني لطلاق الموظفين الحكوميين بعقود عمل

(PPPK) في المحكمة الدينية أرغا ماكور

(دراسة الحكم رقم Pdt.G/2025/PA.AGM/526)

يُعَدُّ الطلاق أحد أشكال انحلال عقد الزواج الذي لا يتم قانونًا إلا بصدر حكم قضائي. وفي التطبيق العملي، لا يقتصر الطلاق على العلاقة الأسرية فحسب، بل تترتب عليه أيضًا آثار إدارية إن اللانحة (PPPK) بالنسبة لموظفي الدولة، بمن فيهم الموظفون الحكوميون بعقود عمل الحكومية رقم 45 لسنة 1990 بشأن تعديل اللانحة الحكومية رقم 10 لسنة 1983 الخاصة بإنهاء هذه PPPK الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية، لم تنظم بعد مسألة طلاق موظفي (Ratio Decidendi) وكذلك الأساس القانوني، PPPK الدراسة إلى تحليل إجراءات نظر قضايا طلاق موظفي في Pdt.G/2025/PA.AGM/526 الذي اعتمد عليه هيئة القضاة في الحكم رقم 526 (Ratio Decidendi) المحكمة الدينية أرغا ماكور.

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري-التجريبي مع مقارنة قانونية نوعية. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من الأحكام القضائية ونتائج المقابلات مع القضاة وكُتَّاب الضبط، في حين استُمدَّت البيانات الثانوية من القوانين واللوائح ذات الصلة والمراجع القانونية.

في المحكمة الدينية أرغا ماكور PPPK وتُظهر نتائج الدراسة أن إجراءات تسوية قضايا طلاق موظفي مع استيفاء المتطلبات الإدارية، بما في (e-Court) ماكور تتم عبر نظام المحكمة الإلكترونية رغم أن اللوائح (PPK) تلك الحصول على إذن الطلاق من المسؤول المختص بشؤون التوظيف المطبقة تخص موظفي الخدمة المدنية. وفي نظر القضية، تلتزم هيئة القضاة بتطبيق مراحل الإجراءات المدنية بشكل كامل، بدءًا من محاولات الصلح، مرورًا بإجراءات الإثبات، وانتهاءً بإصدار الحكم.

وبذلك، فإن الحكم بالطلاق الرجعي البائن بينونة صغرى في هذه القضية يدل على أن تسوية طلاق في المحكمة الدينية أرغا ماكور تستند إلى مبادئ اليقين القانوني، والعدالة، PPPK موظفي والانضباط الإداري في شؤون التوظيف.

الكلمات المفتاحية: الطلاق PPPK المحكمة الدينية، (Ratio Decidendi) الأساس القانوني للحكم الإسلامي

Valid document
Validated & Verified By :

Ka. UPT DAHASA
UINFAS BENGKULU

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pengadilan Agama Arga Makmur (Studi Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM).” Shalawat dan salam penulis sampaikan pada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairudin, M.Ag. selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd selaku Direktur Program Pasacsarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ibu Dr. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, MHI selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kantor tersebut.
7. Seluruh Aparatur Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah memberi bantuan dalam rangka penyusunan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Aamiin.

Bengkulu,

2026

Gabrella Juli Andani
NIM 2423680022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Relevan	13
H. Kerangka Teori	17
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	27
2. Sebab-Sebab Perceraian	37
3. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian	43
B. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	
1. Pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	47
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	51

3. Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian	58
C. Pengaturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	
1. Ketentuan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	65
2. Tata Cara Pengajuan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	67
3. Konsekuensi Hukum dan Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Perceraian PNS	68
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian	70
C. Sumber Data	70
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Teknik Analisis Data	74
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	76
1. Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian PPPK oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM di Pengadilan Agama Arga Makmur	76
2. Pertimbangan Majelis Hakim (Ratio Decidendi) dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian PPPK pada Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM di Pengadilan Agama Arga Makmur	108
B. Pembahasan	113
1. Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian PPPK oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.Agm di Pengadilan Agama Arga Makmur.....	113

2. Pertimbangan Majelis Hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM	118
--	-----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

